

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Signifikansi Penulisan

Kementerian Pertanian meraih penghargaan keterbukaan informasi publik oleh KIP (Komisi Informasi Pusat) pada tanggal 5 November 2018 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Berikut adalah berita yang dikutip dari Detik Finance :



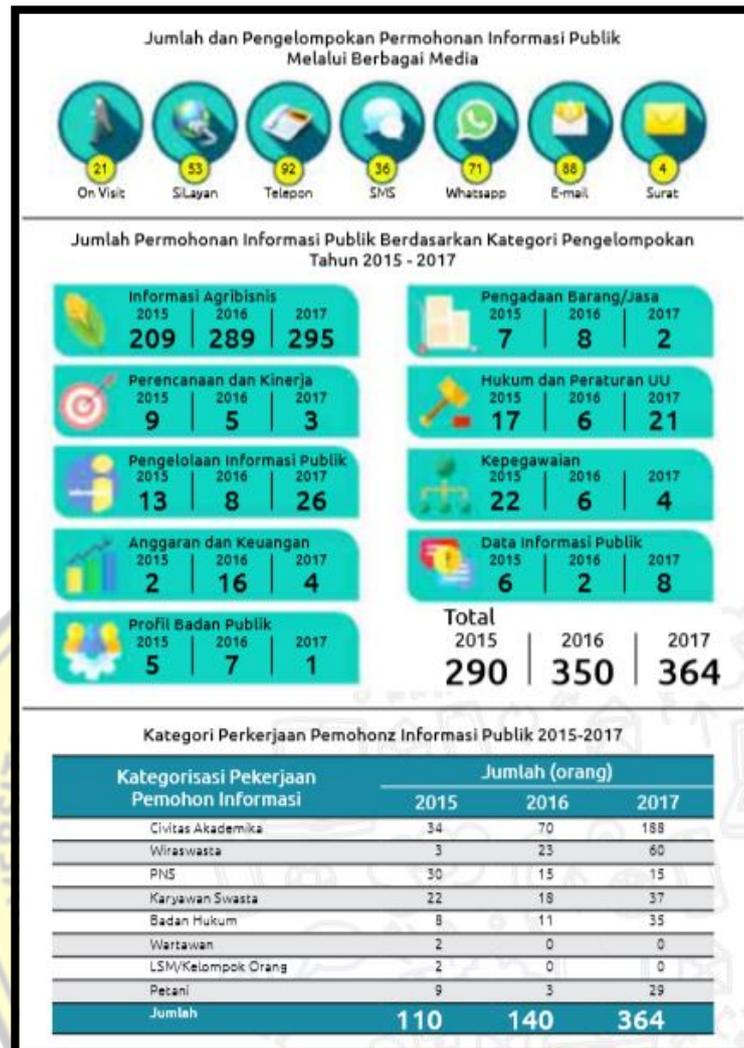
Gambar 1.1 Kementerian Pertanian Raih Penghargaan
Keterbukaan Informasi Publik
Sumber : Detik Finance

Berdasarkan berita diatas, bahwa Kementerian Pertanian meraih penghargaan keterbukaan informasi publik oleh KIP (Komisi Informasi Pusat) yang diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yaitu bapak Syukur Iwantoro, Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan kategori Badan

Publik menuju informatif. Pada saat kegiatan berlangsung Bapak Syukur Iwantoro menyampaikan pesannya yaitu “Kementan akan terus berkomitmen melayani informasi secara baik dan mudah diakses oleh publik”. Kementerian Pertanian akan terus meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam keterbukaan informasi publik. Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pendapatnya yaitu “Perlu keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan terus didorong, dan diawasi agar bisa berjalan dengan baik” yang disampaikan pada saat pemberian anugerah informasi publik 2018 di Istana Wakil Presiden.

Sehingga sangat disayangkan apabila informasi publik yang dikelola oleh Kementerian Pertanian jika tidak tersampaikan ke masyarakat terutama petani Indonesia. Dalam hal ini petani di Indonesia kurang aktif terhadap informasi publik yang sudah disajikan oleh Humas Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu melalui *Website* ppid.pertanian.go.id. Semakin tahun permohonan informasi melalui *Website* tersebut semakin meningkat, sedangkan pengkategorian berdasarkan profesi bahwa petani Indonesia masih sangat minim dalam permohonan informasi publik / mengakses *Website* ppid.pertanian.go.id. Sangat disayangkan apabila petani Indonesia tidak mengakses *Website* informasi publik tersebut, karena dalam *Website* tersebut petani Indonesia dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi mengenai peluang usaha dibidang pertanian yaitu pada bagian informasi agribisnis, dan juga petani Indonesia dapat melakukan pengajuan pengadaan alat atau mesin untuk keperluan pertanian dengan cara mengajukan ke Kementerian Pertanian dalam *Website* informasi publik tersebut untuk mengetahui bagaimana prosedurnya, dan masih banyak lagi informasi lainnya yang dapat diakses dalam *Website* ppid.pertanian.go.id.

Namun petani Indonesia kurang aktif dalam permohonan informasi publik / mengakses salah satu *Website* Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu ppid.pertanian.go.id. Berikut adalah data laporan tahunan permohonan informasi publik *Website* ppid.pertanian.go.id :



Gambar 1.2 Kategori Pekerjaan Permohonan Informasi Publik

Sumber : Laporan Tahunan Permohonan Informasi

Publik www.ppid.pertanian.go.id

Laporan tahunan permohonan informasi publik melalui *Website* ppid.pertanian.go.id berdasarkan kategorisasi pekerjaan pemohon informasi bahwa petani masih sangat minim dalam mengakses dan permohonan informasi publik, dapat dilihat dari tabel di atas pada tahun 2015 hanya 9 orang yang mengajukan permohonan informasi, pada tahun 2016 hanya 3 orang pemohon saja yang mengajukan permohonan informasi, dan di tahun 2017 meningkat menjadi 29 orang yang mengajukan permohonan informasi, namun angka tersebut masih sangat minim dibandingkan pemohon informasi lainnya yang berbeda profesi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik disuatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/050/5/2016 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka dari itu Kementerian Pertanian membuat *Website* informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui www.ppid.pertanian.go.id yang di kelola oleh PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik seperti melakukan proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang disebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut terutama para petani Indonesia. Berdasarkan dari *Website* ppid.pertanian.go.id bahwa visi dan misi dari PPID Kementerian Pertanian adalah terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan dan informasi publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, serta mudah diakses, mendorong keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian Pertanian, mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga masyarakat umum terutama petani Indonesia dapat mengetahui bagaimana kegiatan maupun kinerja dari Kementerian Pertanian dan juga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pertanian melalui *Website* ppid.pertanian.go.id. Berikut adalah *Website* informasi publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia :



Gambar 1.3 Website Informasi Publik Kementerian Pertanian

Sumber : www.ppid.pertanian.go.id

Website tersebut merupakan salah satu Website dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dalam Website tersebut dikhususkan untuk menyebarkan informasi kepada publik yang dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu informasi berkala, serta merta, setiap saat, transparansi kinerja, seperti informasi peluang bisnis dibidang pertanian, prosedur untuk mengeksport hasil pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian, inovasi baru pertanian, dan masih banyak lagi informasi yang disajikan dalam Website tersebut.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia membuat Website informasi publik ditujukan untuk masyarakat umum dan juga petani Indonesia, namun sangat disayangkan apabila petani Indonesia kurang aktif dalam pemanfaatan Website informasi publik. Karena petani Indonesia kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Website. Karena mayoritas para petani Indonesia sudah berusia cukup tua, mereka adalah kaum minoritas dari pemanfaatan internet dan juga mereka sangat jauh dari penggunaan

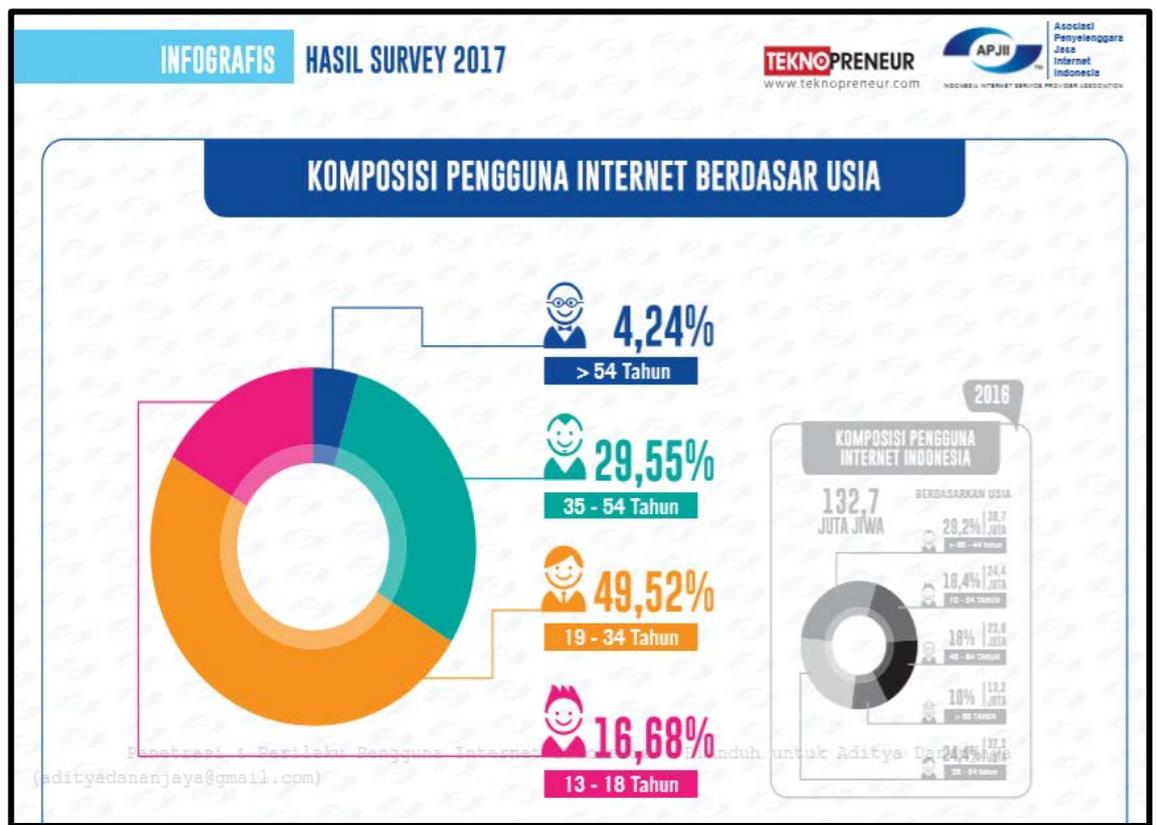
internet. Berikut adalah usia petani Indonesia berdasarkan dari data BPS (Badan Pusat Statistik) :

Kelompok Umur	Jenis Kelamin Petani Utama		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<15	2 639	423	3 062
15-24	208 848	21 029	229 877
25-34	2 939 776	189 761	3 129 537
35-44	6 378 961	506 303	6 885 264
45-54	6 524 709	801 005	7 325 714
55-64	4 441 024	789 022	5 230 046
65+	2 640 010	691 959	3 331 969
JUMLAH	23 135 967	2 999 502	26 135 469

Gambar 1.4 Hasil Survei Usia Petani Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Mayoritas usia petani di Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah berusia 45 - 54 tahun dengan jumlah 7.325.714 jiwa, survei yang telah dilakukan pada tahun 2013. Pada usia petani tersebut, mereka kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet, dan juga pada usia tersebut mereka adalah kaum minoritas dalam pemanfaatan internet. Berikut adalah data hasil survei penggunaan internet berdasarkan pengelompokan usia yang telah dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) :



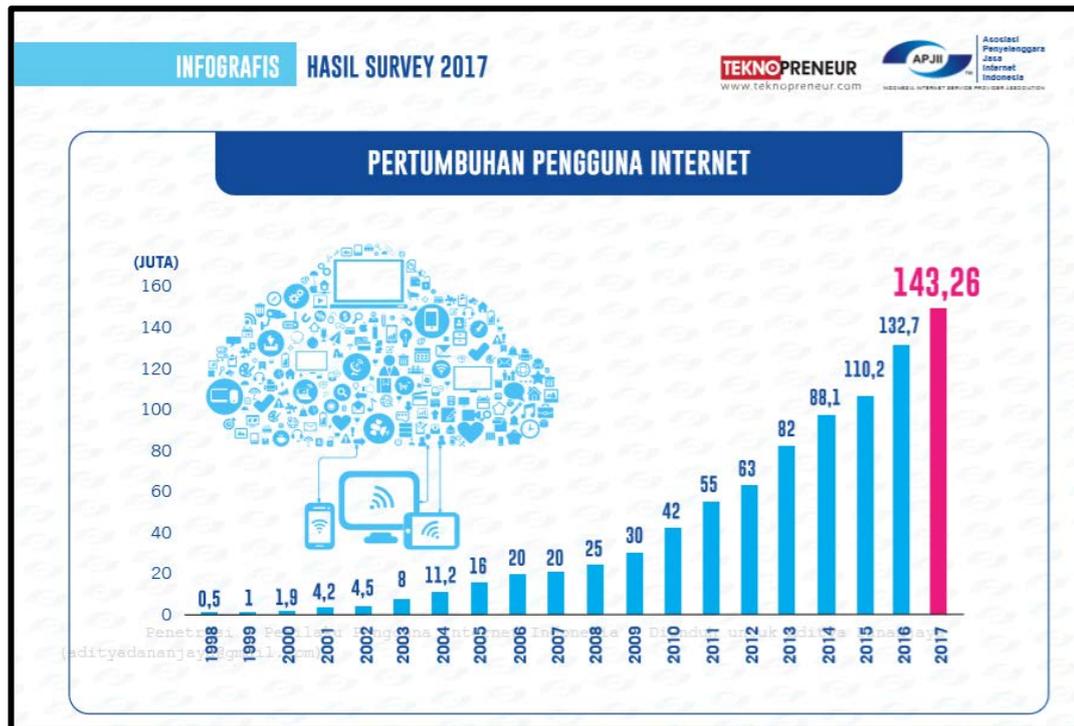
Gambar 1.5 Hasil Survei Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Sumber : APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Dari hasil survey tersebut pengelompokan pengguna internet berdasarkan usia adalah 16,68% pengguna internet berusia 13-18 tahun, 49,52% pengguna internet berusia 19-34 tahun, 29,55% pengguna internet berusia 35-54 tahun, untuk usia 54 tahun ke atas hanya 4,24%. Sedangkan usia petani Indonesia mayoritas adalah berusia 45 – 54 tahun, dimana usia tersebut adalah kaum minoritas terhadap penggunaan internet, dan kurang melek terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Semakin berkembangnya zaman di era globalisasi ini, teknologi makin berkembang terutama di bidang internet, penggunaan internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 hasil survei pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta jiwa sedangkan dibandingkan hasil survei terakhir yang telah dilakukan

pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia sebesar 143,26 juta jiwa dari 262 juta orang, atau sebesar 54,68% dapat di katakan setengah penduduk indonesia menggunakan internet. Berikut adalah hasil survei yang telah dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mengenai perkembangan pengguna internet di Indonesia :



Gambar 1.6 Hasil Survei Pertumbuhan Pengguna Internet

Sumber : APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

Di era digital ini setiap tahunnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat, lebih dari setengah penduduk di Indonesia yang menggunakan Internet. Pada tahun 2017 sebanyak 143,26 juta jiwa masyarakat yang menggunakan internet.

Berdasarkan latar belakang diatas telah dijelaskan mengenai perkembangan internet dan juga siapa saja kalangan pengguna internet berdasarkan usia. Para petani indonesia rata - rata berusia 45 -54 tahun, dimana usia tersebut adalah kaum minoritas terhadap penggunaan internet, yang seharusnya mereka dapat mengetahui banyak informasi dari internet, tetapi mereka kurang sadarnya perkembangan teknologi tepatnya dalam penggunaan internet.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia memanfaatkan inovasi baru dari perkembangan teknologi yaitu *Website* ppid.pertanian.go.id untuk menyebarkan informasi publik dan didasari oleh Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap badan publik wajib untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

Namun dari data yang penulis dapatkan mengenai permohonan informasi publik berdasarkan profesi atau pekerjaan, bahwa profesi petani sangat jauh dan minim dalam mengakses *Website* informasi publik yaitu www.pertanian.go.id. Seharusnya petani dapat memanfaatkan inovasi *Website* informasi publik tersebut untuk mendapatkan banyak informasi seperti peluang bisnis di bidang pertanian, inovasi baru pertanian, prosedur pengadaan alat dan mesin untuk keperluan pertanian, dan lain-lain. Karena petani Indonesia masyarakat yang pasif terhadap penggunaan internet maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana strategi Humas Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mensosialisasikan informasi publik yaitu *Website* ppid.pertanian.go.id kepada masyarakat umum khususnya petani Indonesia yang jauh dari penggunaan internet.

1.2. Fokus Penulisan

Dalam penulisan ini yang berjudul “Strategi Humas Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Kepada Petani Indonesia (Studi Kasus pada *Website* ppid.pertanian.go.id)”. Fokus penulisan yang akan dibahas adalah bagaimana cara Humas Kementerian Pertanian dalam mengelola *Website* informasi publik www.ppid.pertanian.go.id,

bagaimana mereka mensosialisasikan kepada pihak eksternal terutama petani Indonesia mengenai *Website* informasi publik tersebut.

1.3. Pertanyaan Penulisan

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penulisan yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Mengapa Humas Kementerian Pertanian melakukan kegiatan sosialisasi website informasi publik kepada petani Indonesia ?
- 2) Bagaimana Humas Kementerian Pertanian dalam mengelola *Website* informasi publik www.ppid.pertanian.go.id ?
- 3) Bagaimana strategi Humas Kementerian Pertanian mensosialisasikan *Website* informasi publik ppid.pertanian.go.id kepada masyarakat terutama petani Indonesia ?

1.4. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pertanyaan penulisan di atas, maka tujuan dari proposal penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan cara Humas Kementerian Pertanian mengelola *Website* informasi publik www.ppid.pertanian.go.id
- 2) Untuk menjelaskan cara Humas Kementerian Pertanian mensosialisasikan kepada pihak eksternal terutama petani Indonesia terkait *Website* informasi publik yang dapat di akses melalui ppid.pertanian.go.id
- 3) Untuk menjelaskan mengapa Humas Kementerian pertanian melakukan kegiatan sosialisasi website informasi public kepada petani Indonesia ?

1.5. Manfaat penulisan

Gambaran dari tujuan penulisan diatas, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat antara lain :

1) Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan agar hasil dari penulisan ini mengenai “Strategi Humas Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dalam Pelayanan Informasi Publik Kepada Petani Indonesia (Studi Kasus Pada *Website*

ppid.pertanian.go.id)” dapat bermanfaat bagi ilmu komunikasi karena dalam pembahasan ini mengembangkan teori komunikasi yang digunakan yaitu difusi inovasi, strategi humas dalam menyebarkan informasi dan mensosialisasikan kepada pihak eksternal mengenai *Website* informasi publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan juga dapat bermanfaat dalam bidang ilmu *Public Relations*, Karena dalam penulisan ini akan membahas mengenai penggunaan *Website* sebagai implementasi dari *Cyber Public Relations*.

2) Manfaat Praktis

Dari penulisan ini diharapkan agar bermanfaat untuk pengetahuan dan wawasan kepada perusahaan atau instansi yang ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan *Website* dan bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada masyarakat, dan diharapkan agar bermanfaat bagi mahasiswa Komunikasi khususnya dengan konsentrasi *Public Relations*.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisikan teori dasar yang berhubungan dengan penulisan dan kerangka konsep dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENULISAN

Bab ini membahas mengenai metode penulisan yang digunakan, jenis penulisan, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik keabsahan da ta dan waktu serta tempat penulisan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai deskripsi objek penulisan, analisis informan dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan – bahan penerbitan lainnya yang dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar berbagai sumber yang digunakan.

